

BAB SATU

PUNCAK GUNUNG ES

Perawakan Zulkifli Lubis sama sekali tak ada potongan sebagai *spymaster* [kepala badan intelijen] pertama Indonesia. Terlahir di Aceh sehari sesudah Natal 1923 sebagai anak kelima dari sepuluh bersaudara, Lubis yang berkacamata tidak menyukai olahraga semasa mudanya. Bahkan kulitnya—mulus, seputih pualam—serta suaranya—yang juga lembut, seperti wanita—menyembunyikan tanda-tanda kejantanannya.¹

Namun, di dalam kelas, Lubis siswa yang luar biasa. Ketika ia lulus dari SMP pada 1941, nilai-nilainya yang memuaskan membolehkan ia meneruskan pendidikannya ke sebuah SMA terpandang di Jogjakarta, pusat budaya Jawa. Setahun kemudian, ketika Kekaisaran Jepang merangsek ke seluruh penjuru kepulauan Indonesia, mereka segera mengamati potensi kesiswaannya: bukan hanya karena Lubis pada usia 18 tahun itu telah bergabung pelatihan milisi, tetapi pada awal 1943, ia juga menjadi salah seorang Indonesia pertama yang terpilih sebagai taruna yang tergabung dalam *PETA* (Pembela Tanah Air).

Di *PETA*, Lubis berkenalan untuk pertama kalinya dengan dasar-dasar intelijen. Di Tangerang, yang terletak sedikit di luar kota Jakarta, tentara Jepang mendirikan versi lokal dari sekolah intelijen militer Nakano yang terkenal itu, dan Lubis berada di antara lulusan pertamanya.² Berikutnya, Lubis ditempatkan di pusat intelijen regional Jepang di Singapura pada pertengahan 1944. Di sana, ia menyerap bukan saja teori tapi juga aplikasi prakteknya. Di antara pelajaran berharga yang didapat adalah dari seorang perwira intelijen Jepang yang berulang-ulang bercerita tentang penaklukan Prancis di Indocina yang terutama dengan kampanye peperangan psikologis, dan bukan pertempuran bersenjata.

Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945, Lubis boleh dibilang telah memiliki pengalaman intelijen perang lebih banyak dibandingkan orang Indonesia barang siapa pun. Sesudah bergegas kembali

ke Jakarta, ia menghubungi mantan koleganya di PETA—yang sebagian besar kini mendukung di belakang kemerdekaan Republik Indonesia—dan berpikir keras tentang perlunya menciptakan suatu kemampuan intelijen bagi negara baru ini. Secara terbuka usahanya ini didukung dua mantan perwira Jepang, yang tidak ingin sedikit pun menyerah kepada Sekutu atau kembali ke negaranya.

Pada bulan berikutnya, Lubis—yang memberi pangkat dirinya sendiri sebagai seorang kolonel—bekerja cepat untuk membentuk organisasi intelijen pertama Indonesia. Dikenal singkat dengan *Badan Istimewa*, badan ini mencerminkan mendesaknya situasi saat itu.³ Keanggotaan pertamanya dibatasi hanya sekitar empatpuluh mantan perwira PETA dan bekas informan Jepang yang ada di Jakarta, yang kesemuanya menerima pelajaran dari Lubis tak lebih dari seminggu dengan berbagai topik seperti: sabotase, perang psikologis, dan prinsip-prinsip intelijen. Dengan landasan yang terbatas ini, mereka diberangkatkan ke seluruh Jawa dengan perintah mencari dukungan bagi Republik dan melaporkan kembali segala kemungkinan gerak-gerik musuh.

Republik yang mereka cita-citakan menghadapi seabreg tantangan. Diproklamkan pada 17 Agustus, presiden yang muncul dari Republik ini adalah seorang kharismatis, orator flamboyan: Sukarno; sedangkan wakilnya seorang yang soleh dan tidak banyak bicara: Mohammad Hatta. Namun sementara pengetahuan tentang dan dukungan terhadap Sukarno dan Hatta sangatlah tinggi terutama di Jawa, tetapi tidak demikian halnya dengan di luar Jawa.

Selain itu, ada pula keretakan yang terjadi di antara pihak yang bersenjata pendukung Republik. Secara teori, Angkatan Perang yang revolusioner dan bersatu didirikan pada 5 Oktober. Tetapi, karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan bermacam suku yang berbeda, pasukan gerilya seringkali terbagi berdasarkan kedaerahan dan sekte agama, ditimpali kurangnya sikap disiplin dan pengawasan yang bisa menjangkau luar distrik, apalagi luar daerah. Masalah ini diperburuk lagi dengan kesenjangan pelatihan mereka. Ada veteran PETA yang cakap, ada yang pernah sekali bertempur dalam pasukan kolonial Belanda, dan ada banyak lainnya yang sama sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan. Ketika ketiganya bergabung, perpecahan dan buruk sangka pun berkecamuk.

Apalagi, tak lama kemudian Republik ini mendapatkan tantangan dari luar negeri. Walaupun Belanda secara terbuka berniat merebut kembali negeri jajahan mereka, tetapi karena kehabisan daya dan

tenaga sesuai Perang Dunia II, diperlukan waktu untuk memulihkan kembali pasukan penyerbu mereka. Selama masa peralihan, pasukan Inggris dipilih di antara pasukan Sekutu untuk menerima penyerahan diri tentara Jepang di Indonesia dan memulihkan pengawasan umum. Dampaknya, ini mengacaukan rencana kaum republik.

Tidak mengherankan, berbagai bentrokan pun meletus. Pada akhir September 1945, kontingen Inggris yang pertama dan berjumlah besar mendarat di Jawa. Dua bulan kemudian, meletus pertempuran besar-besaran untuk menguasai Surabaya, mengakibatkan ribuan orang Indonesia gugur akibat pengeboman udara yang meluluhlantakkan semuanya. Pada akhir tahun, kontingen Inggris menyerbu menguasai Semarang dan merangsek maju ke pusat pedalaman.

Pada saat itu, Lubis juga telah pindah ke Jawa Tengah dan berusaha melatih agen intelijen angkatan baru. Selama berkeliling di pedalaman Jawa, ia banyak menemukan remaja yang tak lulus sekolah menengah karena harus ikut berperang. Tigapuluh enam orang yang ia pilih sengaja mewakili suku-suku Nusantara: Jawa, Sunda, Sumatra, dan lain-lainnya dari kepulauan wilayah timur, bahkan ada generasi kedua orang Indonesia keturunan Persia. Mereka semua harus melapor ke sebuah perkebunan kopi yang lebar dekat Ambarawa—sebuah kota kecil perbukitan yang ada benteng Belandanya serta stasiun kereta api—sungguh suatu pilihan tempat nan surealistik. Salah seorang siswa mengenang:

Kami dikirim ke sebuah gereja Katolik terbungkalai yang didirikan biarawan *Trappis* yang bersumpah untuk membisu. Suasana memanas karena terjadi pertempuran hebat di Ambarawa, sehingga kami harus pindah ke bekas penjara Jepang yang dulunya untuk menahan para wanita Belanda.⁴

Kontingen ini tinggal di bekas sel penjara, mereka dididik oleh para instruktur dengan beragam latar belakang. Tiga orang mantan awak kapal Jerman memberikan latihan fisik setiap harinya. Mereka mantan awak kapal selam U-boat yang ditawan di Asia Tenggara selama perang, dan tak seorang pun yang ingin kembali ke Nazi Jerman yang kalah. Teknik-teknik paramiliter diajarkan oleh dua perwira Jepang yang telah bergabung dengan Lubis sejak pertengahan 1945 di Jakarta. Taktik tempur kelompok kecil diajarkan oleh para mantan perwira PETA. Sedang Lubis sendiri mengajar tentang pengantar intelijen sekali seminggu. Ajarannya yang sederhana adalah: Mereka

akan menjadi “*prajurit bayangan yang bertempur dalam perang adu pintar*.”⁵

Ketiga lusin remaja ini kesemuanya menyelesaikan pelatihan mereka pada minggu pertama Mei 1946 dan berkumpul di Jogjakarta. Karena perang sedang berkecamuk, mereka segera diangkat menjadi letnan dua angkatan pertama Republik.⁶ Mereka juga diberi kartu tanda pengenal yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno, yang pada awal tahun itu telah memindahkan ibukota negara ke Jogjakarta.

Menurut kartu pengenal itu, para letnan yang baru lulus ini adalah anggota dari *Badan Rahasia Negara Indonesia* (BRANI).⁷ BRANI secara resmi dibentuk pada 7 Mei oleh Lubis, dan berfungsi sebagai organisasi payung bagi unit-unit *ad hoc* yang menyebar dan dibentuk oleh para komandan lapangan di seluruh Jawa. Salah satu satuan tersebut berada di Surabaya dan bernama *Kontra Intelijen* (*Counter-Intelligence*) yang bertugas mengurangi simpatisan Belanda yang banyak di Jawa Timur. Satuan lain, dikenal dengan nama *Persiapan Lapangan* (*Field Preparation*) yang bertugas melaksanakan pengamatan dan “mempersiapkan lapangan” dengan menggalang dukungan bagi Republik. Lubis kemudian tidak hanya membatasi lingkup tugasnya di Jawa saja, tapi ia juga menyiapkan sel-kecil Persiapan Lapangan yang dengan kapal laut menuju ke berbagai daerah seperti Bali, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra.

Kelompok ketiga yang sebagian besar beranggotakan letnan dua yang baru saja lulus pendidikan ini, diarahkan untuk melakukan operasi di luar negeri. Pada saat itu, tentara Republik sedang mengalami kekurangan amunisi dan obat-obatan, sehingga para letnan ini ditugaskan ke Singapura untuk mendapatkan dua komoditas ini. Antusiasme mereka, sayangnya tidak didukung oleh satu hal penting, yaitu dana tunai. Guna mengantisipasi hal ini, sebelumnya, Lubis telah menghubungi beberapa pemilik perkebunan tebu di Tegal dan mendapatkan prosentase sebagian dari pendapatan mereka yang ditukar dengan hak ekspor ke Singapura. Lubis juga membongkar persediaan candu yang disimpan Belanda di Jogjakarta, dan menjualnya kepada para pedagang Tionghoa di Jakarta.⁸ Tapi, sayangnya, semua dana tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional BRANI. Sebagian besar agen yang dikirim ke Singapura tersebut tidak memiliki cukup dana untuk membiayai kehidupan mereka, apalagi untuk membeli kebutuhan perang yang sangat dibutuhkan di tanah air. Untuk menutupi kebutuhan sehari-

hari, mereka terpaksa harus bekerja serabutan (sebagian besar malah bekerja di pangkalan militer Inggris).

Berbagai kesulitan yang dihadapi tidaklah menyurutkan semangat mereka di lapangan. Pada 1947, beberapa agen BRANI di Singapura memperluas jaringan mereka ke berbagai tempat seperti: Hong Kong, Thailand, dan Burma. Walaupun mendapat berbagai pujian atas upaya mereka, tetapi mereka belum menuai sukses. Salah satu dari beberapa prestasi yang berhasil mereka capai adalah: Letnan Aswis Sumarmo, yang berhasil masuk Bangkok tanpa berbekal paspor atau dukungan keuangan, berhasil membangkitkan simpati bagi perjuangan Indonesia dan mengirimkan beberapa kotak yang berisi perlengkapan pengobatan ke tanah air.



Kembali ke tanah air, Lubis bekerja keras sebagai kepala badan intelijen. Dengan BRANI yang bertanggung jawab langsung kepada Sukarno, ia menjadi salah seorang dari beberapa perwira militer yang dapat membangunkan Sukarno dari tidurnya guna memberikan penjelasan atas suatu kejadian penting. Kepercayaan ini tentunya dibalas dengan kesetiaan. Pada Juli 1946, ketika Sukarno mendapat tantangan dari Sudarsono, seorang perwira senior di Jawa Tengah, Lubis menempatkan salah seorang agen kepercayaannya untuk menjadi ajudan Sukarno. Ketika Sudarsono tiba di kantor Sukarno dengan membawa pistol dan menunjukkan sikap yang emosional (dan berpotensi membahayakan), ajudan tersebut meminta sang jenderal untuk meninggalkan senjatanya di luar, yang kemudian ternyata merupakan jebakan agar Sudarsono dapat ditangkap.

Walaupun Sukarno tanpa ragu-ragu mempercayai Lubis, namun ada beberapa pejabat sipil di Departemen Pertahanan yang melobi agar fungsi intelijen tidak lagi berada di bawah naungan militer tetapi di bawah naungan sipil. Yang memimpin upaya ini adalah sang menteri pertahanan sendiri, Amir Sjarifuddin, seorang aktivis kemerdekaan berhaluan kiri sejak tahun 30-an dan pernah menjadi anggota perlawanan bawah tanah terhadap pendudukan Jepang.

Pada awal masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, Sjarifuddin telah mencoba mendirikan sebuah organisasi intelijen yang berada di bawah kementeriannya. Organisasi ini dikenal dengan nama *Badan Pertahanan B* dan dipimpin oleh seorang mantan komisar polisi, namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Tetapi, menyusul rapat perencanaan yang diadakan pada 12 Maret 1947 di

Jogjakarta; tanggal 30 April, Sukarno memberikan persetujuannya untuk menggabungkan semua unit intelijen yang ada ke dalam sebuah badan yang berada di bawah naungan kementeriannya Sjarifuddin. Keesokan harinya, BRANI dibubarkan. Bersama-sama dengan Badan Pertahanan B, keduanya kini digabungkan ke dalam suatu unit baru yang bernama *Bagian V* [Bagian Kelima] dan berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan.

Sedari awal, kepentingan politik sangat menonjol di Bagian V ini. Orang yang dipilih oleh Sjarifuddin untuk memimpin unit ini adalah mantan taruna Angkatan Laut bernama Abdulrahman. Ia pernah mendapat pelatihan dari tentara Sekutu di Australia selama Perang Dunia II, tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan formil di bidang intelijen. Rupanya, yang lebih penting adalah simpati politiknya yang cenderung ke kiri, sama seperti sang Menteri Pertahanan.

Di bawah kepemimpinan Abdulrahman, Bagian V ini tetaplah suatu unit yang kecil. Dengan anggota awal berjumlah tigabelas orang yang semuanya bertugas di kantor pusat, sebagian besar dari mereka dipusatkan untuk menangani masalah militer, politik, dan ekonomi. Dr Rubijono, dokter pribadi Sukarno, bertugas menangani komunikasi rahasia.⁹ Lubis, yang paling berpengalaman di antara kelompok tersebut, dipinggirkan menjadi salah satu dari tiga staf eksekutif.

Tidaklah mengherankan dengan jumlah anggota yang terbatas serta kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, hasil yang dicapai Bagian V ini sangatlah tidak memuaskan. Salah seorang agen lapangan mengatakan:

Mereka memiliki seorang mantan informan Jepang yang menulis memo satu halaman tentang cara melaksanakan pengintaian. Salah satu petunjuknya, misalnya: “Jagalah jarak antara target yang sedang diintai dan diri Anda”, dan “ketika sedang mengintai dari pojok sebuah bangunan, berhati-hatilah agar tidak terlihat”. Semua itu hanya akal sehat belaka, mirip banyolan.¹⁰

Dua bulan sejak pembentukan seksi ini, sang Republik mendapatkan ancaman serius. Pemerintah Belanda, yang selama ini telah menerjunkan kembali pasukannya di Asia Tenggara, melakukan serangan besar-besaran untuk merebut kembali Indonesia. Dalam waktu dua minggu, mereka berhasil menguasai hampir semua bagian di Jawa, kecuali daerah pedalaman di Jawa Tengah sekitar Jogjakarta.

Walaupun tentara Republik semakin terdesak, tetapi sangsi diplomatik masih berperan. Dengan adanya tekanan bertubi-tubi dari luar negeri—terutama Amerika Serikat—Belanda akhirnya setuju untuk duduk di meja perundingan pada akhir tahun. Perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Amerika *Renville* ini menghasilkan perjanjian Renville yang mulai berlaku awal 1948.

Renville memiliki dampak yang penting bagi struktur intelijen di Indonesia. Salah satu esensinya, perjanjian ini mengatakan bahwa semua perwira militer menyetujui penurunan pangkat, sehingga pangkat Lubis kini menjadi letnan kolonel. Yang lebih penting lagi, perjanjian ini juga mengakibatkan jatuhnya Sjarifuddin (yang telah dipromosikan menjadi Perdana Menteri pada pertengahan 1947) pada awal 1948. Sebagai akibatnya, Bagian V juga turut dibubarkan, setelah baru berjalan kurang dari satu tahun.

Lubis tak menyia-nyiakan waktu dan segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih kegiatan intelijen. Karena Sjarifuddin telah mengajak para anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk bergabung ke dalam Bagian V, maka badan itu dianggap telah ditunggangi secara politik. Alih-alih membangkitkan kembali suatu unit di Kementerian Pertahanan, pada periode enam bulan berikutnya, Lubis bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan intelijen taktis dalam tubuh tentara.

Usaha tersebut tidak segera membuahkan hasil. Pada Agustus 1948, Sjarifuddin secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya adalah anggota PKI sejak tahun 1935. Sebulan kemudian, PKI mengambil alih Madiun di Jawa Timur. Pihak militer segera melancarkan serangan balik. Pada akhir November, pergolakan komunis di Madiun ini berhasil ditumpas, Abdulrahman yang melarikan diri kemudian ditangkap Belanda. Sjarifuddin yang kurang beruntung akhirnya juga tertangkap dan dieksekusi tentara Republik secara diam-diam.

Walaupun gangguan dari PKI telah berakhir, tak ada alasan bagi Republik untuk bergembira ria. Pada Desember di tahun yang sama, Belanda melanggar perjanjian damai yang telah disepakati dan melancarkan serangan militer besar—besaran. Kali ini, mereka berhasil merebut Jogjakarta dan menangkap hampir semua pemimpin Republik. Tapi itu semua bukanlah jaminan. Sama halnya seperti serangan militer yang pertama, pihak Belanda menghadapi tekanan diplomatik yang bertubi-tubi. Negosiasi berlangsung hampir selama satu tahun, dan semakin lama semakin jelas bahwa kemerdekaan Indonesia tinggal menunggu waktu belaka. Kesepakatan akhirnya

berhasil ditandatangani pada 27 Desember 1949, yang mana Belanda bersedia menyerahkan kedaulatannya atas wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat.

Kendati Indonesia telah mendobrak belenggu kolonial, tantangan masih susul-menyusul. Militernya yang masih hijau—waktu itu secara gabungan disebut Angkatan Perang—sejak awal 1950 harus menerima adanya beberapa pemberontakan yang meletus di luar Jawa. Hal yang serupa juga terjadi dengan para petinggi militernya yang saling sikut-sikutan. Sebenarnya hal ini sudah bisa ditebak: ketika kini perang kemerdekaan telah usai, muncullah gerakan membubarkan laskar-laskar yang tak dikehendaki, disebabkan terbatasnya jabatan di kemiliteran ketika masa damai tiba, apalagi mengingat dana yang juga terbatas.

Lubis kini terjebak di tengah persaingan ini. Selama dua tahun terakhir ini, usahanya untuk membentuk kembali badan intelijen tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan, Lubis mengalami konflik pribadi dengan para perwira senior. Dalam daftar teratas, terdapat nama Abdul Haris Nasution yang ketika itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Baik Lubis maupun Nasution adalah orang Batak, kelompok etnis asal Sumatera Utara yang dikenal blak-blakan dan berjiwa wiraswasta, bahkan mereka adalah saudara sepupu. Tetapi, mereka malah menjadi musuh bebuyutan di angkatan bersenjata. Komentar salah seorang rekan sejawat mereka: “Ketika singa dan macan berada dalam kandang yang sama, mereka pasti akan berkelahi”.¹¹

Lubis juga berseberangan dengan Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang. Perseteruan ini berdampak pada kekalahan Lubis (yang kini telah naik pangkat menjadi kolonel). Pada awal 1952, pada saat ia berusaha untuk kembali membentuk badan intelijen di Ibukota Jakarta, Simatupang melakukan intervensi dan menurunkan badan ini menjadi setingkat staf. Hal ini tercermin dari nama lembaga baru ini : *Biro Informasi Staf Angkatan Perang* (BISAP).¹²

Sedari awal, BISAP kurang mampu berkembang dengan baik. Sebagian karena masalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Tetapi, sebagian besar kesalahan ada pada Lubis yang lebih sibuk mengurus rivalitasnya dengan Nasution dan Simatupang, daripada mengurus lembaga intelijen ini. Akhirnya Lubis memang mendapatkan kemenangan di arena politik (bahkan ia berhasil mengungguli Nasution ketika terjadi peristiwa Oktober 1952), tetapi BISAP tidak berkembang karena kurang mendapat perhatian. Pada

awal tahun berikutnya, BISAP sepenuhnya dibubarkan.



Karena sifat kerahasiaannya, hakekat dunia intelijen selalu berusaha mengedepankan pragmatisme diplomasi. Di Indonesia, hal ini terlihat jelas pada Februari 1952, ketika kabinet yang saat itu memerintah lagi-lagi harus menerima mosi tidak percaya akibat perselisihan yang menyangkut bantuan militer dari Amerika Serikat. Beberapa bulan sebelumnya, Washington yang saat itu sedang terlibat dalam Perang Korea, menekankan bahwa bantuan militer terhadap Indonesia hanya akan diberikan dengan syarat bahwa pemerintah Indonesia menolak kehadiran komunis di Indonesia. Kabinet yang berkuasa saat itu menyetujui syarat Amerika ini, namun akibatnya, mendapat kritikan tajam dari para pejabat pemerintahan termasuk Mohammad Hatta, yang menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri Indonesia yang non-blok.

Pada April 1952, kabinet baru berhasil dipilih di Jakarta. Sultan Hamengkubuwono IX dari Jogjakarta terpilih sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Sultan merupakan figur populer tetapi tetap rendah hati dan selama revolusi kemerdekaan beliau memberikan dukungan terhadap Sukarno-Hatta. Beliau bahkan memberikan perlindungan para pemimpin Republik untuk tinggal di Jogjakarta.

Di arena politik, Sultan secara relatif dianggap netral. Seperti Hatta, beliau berpegang teguh kepada non-blok. Walaupun dikenal dengan kenetralannya, baik Sultan maupun Hatta tak lama kemudian mendapat tekanan dari Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Merle Cochran. Merle dikenal sebagai seorang duta besar yang memiliki hubungan luas di kalangan elit Indonesia dan selalu menjunjung tinggi kerahasiaan bahkan di kalangan staf kedutaannya sendiri, dan kali ini ia memiliki sebuah penawaran yang sungguh menarik perhatian. Pemerintah Amerika, katanya, dapat memberikan pelatihan rahasia bagi para kader intelijen di Departemen Pertahanan. Dengan memainkan sentimen anti-Tionghoa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, Cochran mencatat bahwa para kader ini dapat berfungsi sebagai kekuatan gerilya bilamana terjadi serangan komunis Tiongkok di Asia Tenggara.

Tawaran ini membuat posisi Sultan dan Hatta menjadi terjepit. Kabinet sebelumnya, telah jatuh akibat masalah bantuan Amerika ini; dan memperlihatkan kedekatan dengan Washington adalah sama saja dengan bunuh diri. Pada saat yang bersamaan, kedua figur ini

mebutuhkan kemampuan intelijen strategis yang tidak mampu diberikan oleh BISAP. Terlebih lagi, Cochran berjanji bahwa bantuan Amerika ini akan diberikan secara diam-diam. Sebagaimana dengan penawarannya yang dilakukan dengan diam-diam, kedua tokoh ini secara diam-diam menyetujuinya.

Untuk menjalankan proyek ini, Hatta memanggil Sumitro Kolopaking. Ia seorang mantan bupati dari Jawa Tengah, yang pernah ditunjuk oleh Hatta sebagai orang kepercayaannya di *Biro Keamanan*, yaitu suatu badan setara kementerian di kabinet yang mengoordinasikan kegiatan operasi Departemen Pertahanan. Segera sesudah Hatta dan Sultan berhasil menyusun daftar nama berisikan limapuluh warga sipil cakap berusia pertengahan duapuluhan, Sumitro mengirimkan perintah tertanggal 3 September 1952 agar mereka melapor ke Jakarta. Dari sana, kelima puluh orang ini segera dikirimkan ke sebuah tempat tersembunyi di Jawa Tengah pada awal November, guna mengikuti seleksi paramiliter selama sebulan penuh.

Menjelang akhir tahun, tujuhbelas orang yang terpilih (termasuk di antaranya anak Sumitro) mendapat perintah untuk menuju ke suatu pantai di timur kota Semarang. Di sana mereka mendapati sebuah kapal barang *Maria Elisa* yang membuang sauh di lepas pantai. Dalam kegelapan, mereka menaiki kapal tersebut dan disambut para awak kapal dagang-nya yang berkebangsaan Jepang.

Selama tiga hari penuh, *Maria Elisa* berlayar secara perlahan melintasi Selat Makassar yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi. Ombak besar yang menerjang selama pelayaran ini telah membuat sebagian besar para siswa mabuk laut, tetapi mereka segera bersiaga ketika melihat sebuah pesawat terbang rendah. Pesawat tanpa identitas ini—yang ternyata adalah pesawat amfibi PBY Catalina—mendarat dalam alun yang mereda dan segera mendekat.

Walau para siswa Indonesia ini tidak mengetahuinya, PBY itu dioperasikan oleh Civil Air Transport (CAT) sebuah perusahaan penerbangan swasta di Timur Jauh yang dioperasikan oleh Badan Intelijen Amerika (CIA). Dengan menggunakan perahu dayung antara *Maria Elisa* dan pesawat amfibi, para siswa ini segera mencapai kabin. Sebagian besar dari mereka belum pernah menaiki pesawat terbang; sebagai hadiah perkenalan, sang pilot menyalakan mesin pendorong roket ketika mengudara. “Perut kami serasa dikocok-kocok,” ujar salah seorang siswa ini.